

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Penerapan serta pelaksanaan mekanisme pemeliharaan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, terlihat bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara realisasi biaya pemeliharaan dengan anggaran biaya pemeliharaan

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis mengusulkan saran dengan harapan dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten TTU, yaitu;

- 1) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harusnya mengeluarkan PERDA atau PERBUP terkait tentang pengelolaan barang milik daerah agar pengelolaan

barang milik daerah dapat berjalan dengan optimal dan sehingga dari pemeliharaan tersebut dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pemerintah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

- 2) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebaiknya berusaha lebih giat dalam mengoptimalkan pengelolaan dalam pemeliharaan aset daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu memperbaiki upaya pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD baik secara administrasi, fisik, dan hukum yang di anggap gagal dalam mengimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin MHD Habibi. 2010. *Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)*.
- Arikunto., Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As'ad, Moh. 2001. *Ensiklopedia Manajemen, Edisi Kedua, Cet I, Bina Aksara, Jakarta*. Rajawali Press. Jakarta.
- Elmi, Bachrul. 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia*.
- Evita Daufy Marcellya Makagansa, Julli J. Sondakh, Hince Wokas .2015. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jakarta
- Fairoza Hilmah Kh .2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang*. Jakarta
- Fasiha. 2013. *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002 *Etika Administrasi Negara*.PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo, 2004.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Monika Sutri, Kolinug, ventje Ilat, Sherly Pinatik. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomoho*. Jakarta
- Narang, 2001. *Manajemen operasi dan rantai pemasukan*. Jakarta
- Pangabean.2002. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian sengketa*. Pekanbaru.
- Sarundajang, S.H. 2002.*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sigian, SP. 2002. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singanimbun. 2001. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.